

## **EFEKTIVITAS PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN BANJIR DI KOTA PALEMBANG (STUDI KASUS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA PALEMBANG)**

**Shelly Pramesti Syaquila Istamal<sup>1</sup>, Doris Febriyanti<sup>2</sup>, Qur'anul Kariem<sup>3</sup>**

<sup>1)</sup>Mahasiswa Fakultas Ilmu Pemerintahan Dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri

<sup>2),3)</sup>Dosen Fakultas Ilmu Pemerintahan Dan Budaya, Universitas Indo Global Mandiri

Email: 2018610031@students.uigm.ac.id

### **ABSTRACT**

*This research project aims to describe the effectiveness of flood control and prevention by the Public Works and Spatial Planning (PUPR) Office of Palembang City. To this end, a qualitative approach with a purposive sampling method will be employed. The data was obtained from the Functional Position of Irrigation Engineering of the PUPR Office through observation, interviews, and documentation. The data analysis was conducted in accordance with the Miles and Huberman model, which encompasses data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the PUPR Office has implemented various initiatives, including the construction of reservoirs, sluice gates, pumping stations, and drainage maintenance, which have contributed to the reduction of flood points. However, the community and NGO Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (KAWALI) perceive these programmes to be suboptimal, particularly during periods of heavy rainfall, citing a lack of community involvement. Potential solutions include joint evaluation, enhanced transparency, and collaboration to enhance flood control strategies.*

**Keywords:** *Control, Prevention, Work Program.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektivitas pengendalian dan pencegahan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Palembang, menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Purposive Sampling. Data diperoleh dari Jabatan Fungsional Teknik Irigasi Kantor PUPR melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengikuti model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasilnya menunjukkan bahwa Dinas PUPR telah melaksanakan program seperti pembangunan embung, pintu air, stasiun pompa, dan pemeliharaan drainase, yang mengurangi titik banjir. Namun, masyarakat dan LSM Kawal Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (KAWALI) menganggap program ini belum optimal, terutama saat hujan deras, dengan pelibatan masyarakat yang kurang. Solusi yang diusulkan meliputi evaluasi bersama, peningkatan transparansi, dan kolaborasi untuk memperbaiki strategi pengendalian banjir.

**Kata kunci:** *Kontrol, Pencegahan, Program Kerja.*

#### **A. PENDAHULUAN**

Bencana adalah keadaan darurat mendesak yang dapat menyebabkan kematian, rasa sakit, cedera, kerusakan material dan gangguan kehidupan sehari-

hari manusia dan berada di luar kendali manusia untuk mengendalikan dan mengaturnya. Data yang diperoleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan bahwa tingkat

kejadian tertinggi, khususnya di Kota Palembang, adalah Bencana Banjir. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan mata pencaharian masyarakat yang disebabkan oleh, baik faktor alam dan/atau non alam atau faktor manusia yang mengakibatkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Indonesia, 2007).

Banjir adalah tenggelamnya lahan akibat peningkatan volume air akibat hujan lebat, meluapnya air sungai atau bendungan pecah. Banjir dapat disebabkan oleh penyumbatan saluran air akibat sampah yang dibuang oleh manusia di mana saja. Banjir juga dapat terjadi di daerah kering dengan penyerapan air tanah yang buruk atau jumlah curah hujan melebihi kapasitas penyerapan air. Selain itu, banjir dapat terjadi karena kurangnya penyerapan air akibat pengalihan penggunaan lahan (Sumsel, 2021). Banjir dapat disebabkan oleh berbagai faktor, yaitu kondisi daerah tangkapan hujan, durasi dan intensitas hujan, kondisi topografi, dan kapasitas jaringan jalur air (*drainase*) (Astuti & Sudarsono, 2018).

Dalam sebuah penelitian berjudul *Paparan Banjir dan Kemiskinan di 188 Negara* (2022), ditemukan bahwa negara-negara di kawasan Asia adalah negara

yang paling rentan terhadap risiko bencana banjir. Mulai dari peringkat teratas populasi negara-negara yang terancam banjir adalah China (394,8 juta orang), India (389,8 juta orang), Bangladesh (94,4 juta orang), Indonesia (75,7 juta orang), Pakistan (71,8 juta orang), Vietnam (45,5 juta orang), Amerika Serikat (42,6 juta orang), Nigeria (39 juta orang), Mesir (38,9 juta orang), dan Jepang (36,1 juta orang). Kondisi geogra dan pola urbanisasi relatif merupakan faktor dalam tingginya ancaman banjir. Risiko banjir mendominasi di daerah di mana populasi besar terkonsentrasi di daerah aliran sungai dataran rendah, seperti Brahmaputra (Bangladesh), Efrat dan Tigris (Irak), Irrawaddy (Myanmar), Indus (Pakistan), Mekong (Kamboja, Laos, Vietnam), dan Nil (Mesir, Sudan Selatan) (Rentschler et al., 2022).

Berdasarkan data BNPB, terdapat 1.255 kejadian banjir di Indonesia pada tahun 2023. Jumlah tersebut menurun sebesar 18,03% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 1.531 insiden. Melihat trennya, bencana banjir di Tanah Air berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam satu dekade terakhir. Angka tersebut sempat mengalami lonjakan tertinggi sebesar 93,62% hingga 1.518 insiden sepanjang tahun 2020. Menurut daerah, Sumatera Utara menjadi provinsi yang paling sering dilanda banjir tahun lalu,

yakni 112 insiden. Posisi tersebut diikuti oleh Jawa Barat yang mengalami 107 kejadian banjir. Bencana banjir di Aceh tercatat sebanyak 97 kejadian sepanjang tahun 2023. Kemudian, Jawa Tengah dan Riau masing-masing mengalami 95 insiden dan 79 insiden banjir pada tahun lalu. Banyaknya insiden banjir di negara itu juga menyebabkan korban. BNPB mencatat sebanyak 92 orang meninggal dunia, 4.788 orang luka-luka, dan 3,87 juta orang menderita dan mengungsi. Selain itu, bencana banjir juga menyebabkan kerusakan rumah warga. Tercatat terdapat 1.196 rumah rusak berat, 932 rusak sedang, 16.116 rusak ringan, dan 753.788 rumah terendam akibat banjir. Selanjutnya, sebanyak 314 bencana banjir telah melanda negara itu sejak 1 Januari hingga 15 Maret 2024. Jawa Tengah merupakan daerah yang paling banyak mengalami banjir karena telah mencapai 36 kejadian banjir (Pratiwi, 2024).

Ancaman banjir berpotensi terjadi karena Sumatera Selatan memiliki DAS yang tersebar di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Sebagian besar DAS yang ada tidak lagi mampu menampung debit air, mengakibatkan luapan yang menggenangi daerah di sepanjang sungai. Data BPBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2022-2026 menyebutkan total potensi luas bahaya banjir di Kota Palembang secara

keseluruhan adalah 63.387 Ha. Wilayah bahaya banjir dirinci menjadi 3 kelas bahaya, yaitu area bahaya dengan kadar rendah 35.758 Ha, kelas menengah 18.316 Ha, sedangkan area yang terkena bahaya banjir di kelas tinggi adalah 9.313 Ha.

**Tabel 1**  
**Potensi Bahaya Bencana Banjir di Kota Palembang**

Nomor	Kelas	Luas
1	Tinggi	35.758 Ha
2	Sedang	18,316 Ha
3	Rendah	9.313 Ha
Jumlah		63.387 Ha

Sumber RPB Provinsi Sumatra Selatan  
2022-2026

Banjir terjadi karena curah hujan yang tinggi, sedangkan drainase internal tidak mampu mengalirkan air dengan baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengelolaan air dengan baik dan terintegrasi dari daerah hulu ke hilir (Lestanata & Pribadi, 2016). Selain itu, pengelolaan pemanfaatan lahan untuk daerah tangkapan air dan pengelolaan manusia dalam mengelola sumber daya air perlu ditingkatkan. Banjir, terutama di Kota Palembang, menjadi berita trending saat hujan. Hujan intensitas tinggi ini menyebabkan debit air anak sungai Musi meluap. Kondisi ini diperparah dengan faktor drainase kota yang kurang optimal,

selain itu rata-rata genangan air tidak cepat surut karena selokan air tidak berfungsi dengan baik.

Politisi PDI Perjuangan H.M. Giri Ramanda N Kiemas mengatakan bahwa titik-titik yang terendam banjir di Kota Palembang sudah diketahui dan ada data, dan ini masalahnya adalah jumlah air yang tidak bisa lagi ditampung di saluran dan tidak bisa masuk ke sungai, apalagi saat sungai dalam posisi air pasang, Sehingga menurutnya, dibutuhkan penampungan air. Kemudian politisi PDI Perjuangan R.M. Yusuf Indra Kesuma mengatakan bahwa harus ada sinergi dari semua pihak dalam penanganan banjir di Kota Palembang tanpa terkecuali. Pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kota Palembang ini juga mengatakan bahwa selain curah hujan yang tinggi, banjir di Kota Palembang juga disebabkan oleh drainase yang buruk. Akibatnya, banyak aliran air menyumbat dan menggenangi jalan dan pemukiman. Situasi ini diperkeruh oleh kebiasaan orang yang membuang sampah sembarangan atau tidak pada tempatnya. Artinya, drainase yang ada perlu diperbaiki dan ada beberapa daerah yang perlu dinormalisasi dan Kota Palembang tampaknya membutuhkan beberapa kolam retensi lagi.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2023, berupa penyediaan Ruang Terbuka Hijau, pemulihan fungsi Rawa Konservasi, penyediaan kolam retensi, penyediaan saluran drainase yang memadai dan penyediaan Tempat Pengelolaan Sampah yang tidak menimbulkan pencemaran udara dan air sebagai fungsi pengendalian banjir di Kota Palembang.

Dikutip dari Kompas.com, banjir yang terjadi di Palembang pada 25 Desember 2021 merenggut dua nyawa akibat terseret arus dan tersengat listrik. Korban pertama meninggal dunia setelah terseret arus banjir dan masuk ke gorong-gorong di kawasan Jalan MP Mangkunegara. Dan korban kedua dari Kecamatan Soekarami, Palembang, meninggal di rumahnya karena tersengat listrik. Saat kejadian terjadi, daerah tersebut terendam banjir dengan ketinggian hingga 50 sentimeter (Putra & Khairina, 2021). Banjir di Kota Palembang disebabkan oleh curah hujan yang tinggi yang tidak sebanding dengan debit air yang dapat diserap oleh pompa. Hal ini juga diperburuk oleh permukaan laut yang tinggi (Jati, 2021). Selain itu, banjir juga disebabkan oleh tambak retensi yang terbatas. Hingga saat ini, Palembang hanya memiliki 46 kolam retensi, meskipun dibutuhkan sekitar 77 kolam retensi untuk meminimalisir potensi banjir. Faktor

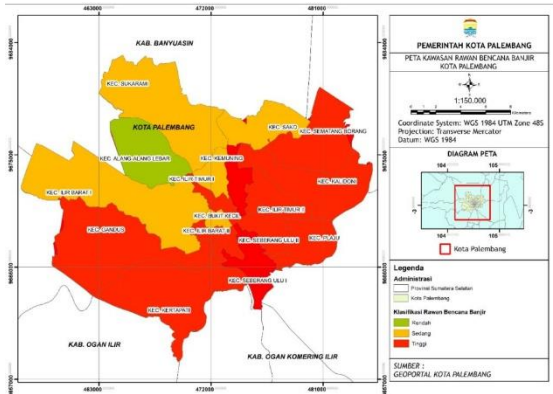
lainnya adalah masih ada tumpukan sampah yang menyumbat saluran air sehingga banjir tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi di daerah Sukabangun, Kecamatan Soekarami, dimana dalam banjir ini ketinggian air mencapai hingga 1 meter. Walhi juga menyoroti bahwa 25-26 Desember 2021 merupakan 30 banjir terburuk terakhir yang dialami Kota Palembang.

Menurut Renstra Kantor PUPR Kota Palembang Tahun 2024 – 2026, terdapat 19 sistem drainase, yaitu 1). Sistem Gandus; 2) Gasing; 3). Lambidaro; 4). Boang; 5). Anak; 6). Bendung; 7). Lawang Kidul; 8). Buah; 9). Juaro; 10). Batang; 11). Selincah; 12). Bentuk; 13). Nyiur; 14). Sriguna; 15). Aur; 16). Kedukan Ulu; 17). Jakabaring; 18). Kertapati; dan 19). Keramas. Untuk situ atau reservoir saat ini berupa kolam retensi dan rawa. Luas rawa di Kota Palembang adalah 5.835,19 Ha (Peraturan Daerah N0.11 th.2012). Dalam konteks pengelolaan rawa, rawa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu rawa konservasi seluas 2.106,13 hektare, rawa budidaya seluas 2.811,51 hektare dan rawa reklamasi seluas 917,85 hektar.

Pencegahan banjir menurut Madi (Wahyudi et al., 2019) Pemerintah harus mengatur izin untuk pembangunan gedung, rumah, pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya. Menciptakan saluran air

yang cukup, baik oleh pemerintah maupun warga. Menjaga kebersihan lingkungan. Wajar jika hal ini membuat bencana banjir menjadi isu nasional yang harus ditangani. Beberapa daerah yang sering banjir memiliki kepadatan penduduk yang tinggi, salah satu contohnya adalah Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Dari data tersebut, diperoleh daerah rawan banjir.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 16/PRT/M/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pasal 28 bahwa Balai Kawasan Sungai memiliki tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi penyusunan program, pelaksanaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi dan pemanfaatan sumber daya air dan pengendalian kerusakan air di sungai, pantai, bendungan, danau, situ, waduk, dan waduk air lainnya, irigasi, rawa, kolam, air tanah, dan air baku serta pengelolaan drainase utama perkotaan.



Gambar 1. Peta Daerah rawan Banjir di Kota Palembang 2022

Sumber: (Palembang, 2022)

Peraturan Daerah Kota Palembang No. 11 Tahun 2012 tentang Pengembangan Pengendalian dan Pemanfaatan Rawa, yaitu pelaksanaan pembangunan pengendalian dan pemanfaatan rawa bertujuan untuk mencapai terwujudnya kesejahteraan masyarakat, yang dilakukan dengan penyiapan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk keperluan pemanfaatan lahan permukiman, pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan, industri, transportasi dan pariwisata serta untuk mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dikutip dari BakoHumas Kota Palembang, upaya pemerintah saat ini membangun kolam retensi untuk penyerapan air. Palembang sudah memiliki 46 tambak retensi, namun keberadaan tambak retensi tersebut masih dinilai belum optimal. Hal ini berdampak pada banjir yang disebabkan oleh faktor alam, yang dapat terjadi akibat cuaca yang tidak

dapat diprediksi, sehingga debit air tidak dapat dikendalikan dengan cepat. Sementara itu, banjir yang disebabkan oleh faktor manusia juga banyak. Seperti menutup saluran air, membuang sampah di sungai dan membangun bangunan tanpa menyediakan area tangkapan air.

Dari data BMKG Provinsi Sumatera Selatan, potensi banjir di Kota Palembang periode Oktober-Desember 2022 adalah kecamatan Gandus, Ilir Barat Dua, Ilir Barat Dua, Ilir Timur Dua, Ilir Timur Dua, Kalidoni, Kertapati, Plaju, Sako, Seberang ulu Dua, Seberang ulu Satu, Sematang borang, Sukarami. Untuk lokasi rawan banjir yang sering terjadi di Palembang, yakni di kawasan Demang Lebar Daun, Jalan Radial Simpang 5 Palembang Icon, Jalan Sultan Mansur, Simpang Polda, Jalan Azhari, RS Siti Fatimah, PTC Mall, Simpang Patal, Jalan Rycudu, Jalan Letnan Jalan Simanjuntak, dan Kolam Retensi Siti Khadijah. Dikutip dari detik.com 2024, lokasi rawan banjir berada di 3 kecamatan, yakni Kertapati, Seberang Ulu (SU) I, dan Gandus. Lokasi 3 kecamatan ini karena curah hujan yang tinggi dan debit air yang tinggi di Sungai Musi juga berpotensi menjadi penyebab banjir (Pahlevi, 2024).

Dikutip dalam sonora.id Walhi di Kota Palembang, faktor masalah banjir adalah, pertama, karena kondisi drainase saluran pembuangan yang tersumbat, tidak berfungsi sebagai saluran air. Kedua,

karena kurangnya penampungan air, kolam retensi dan sungai yang tidak terhubung dengan muara. Situasi banyak anak sungai terkubur dan tidak ada pengerukan yang dilakukan. Ketiga, daerah resapan air mengubah fungsinya sehingga tidak dapat menampung air. Keempat, minimnya ruang terbuka hijau di Palembang (Sasongko, 2022).

Berbagai upaya yang dilakukan Pemkot dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir melalui program Kantor PUPR, yaitu "Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dan Marlina (Mari Pulihkan Saluran Air)". Dimana melalui program ini, pembangunan fasilitas pengendalian banjir dan beberapa peraturan telah dikeluarkan untuk pengendalian banjir. Upaya tersebut ternyata kalah dengan pembangunan kota, selain itu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, padahal Pemerintah seharusnya memiliki peran terbesar dalam pengambilan kebijakan dalam hal ini isu pengendalian banjir. Selain itu, Pemkot Palembang menggunakan strategi dengan melakukan sosialisasi penanggulangan banjir setiap minggu per kecamatan. Dengan mengundang Camat, Kepala Desa dan Ketua Satuan Tetangga. Tujuan dari

penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas pengendalian dan pencegahan banjir oleh Dinas Pekerjaan Umum.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

### **Efektivitas**

Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat serta peralatan yang tepat dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan pekerjaan yang efektif. Robbins (Umam, 2021). Menurut Richard M. Steers (Maleke et al., 2022) efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (*output*). Oleh karena itu, suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif apabila pekerjaan tersebut diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dikatakan efektif jika tujuan atau sasaran tercapai seperti yang telah ditentukan..

Menurut Supriyono (Anisah & Soesilowati, 2018) pengertian efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut. Menurut

(Julianto & Carnarez, 2021) Efektivitas organisasi dipengaruhi oleh 4 (empat) faktor di dalam budaya organisasi yakni keterlibatan (*involvement*), adaptasi (*adaptation*), Misi (*mission*), dan konsistensi (*consistency*).

### **Teori Efektivitas Program**

Efektivitas program merupakan suatu cara untuk mengukur sejauhmana suatu program berjalan, guna mencapai tujuan yang telah diterapkan sebelumnya. Makmur (Najidah & Lestari, 2019) berpendapat bahwa efektivitas program merupakan kegiatan yang pelaksanaannya menampakkan ketepatan antara harapan yang kita inginkan dengan hasil yang di capai, dimana ditunjukkan dengan ketepatan harapan, implementasi, dan hasil yang di capai.

Menurut Campbell J.P, Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol adalah: 1) Keberhasilan program, 2) Keberhasilan sasaran, 3) Kepuasan terhadap program, d) Tingkat input dan output, 5) Pencapaian tujuan menyeluruh (Darman, 2021).

#### **1. Keberhasilan Program**

Efektivitas program mampu berjalan sesuai kemampuan operasional dalam menjalankan program kerja sesuai yang sudah di tetapkan sebelumnya. Keberhasilan terhadap program dapat dilihat pada mekanisme atau proses yang

dilakukan pada suatu kegiatan di lapangan (Awaliah, 2022).

#### **2. Keberhasilan Sasaran**

Efektivitas dilihat dari capaian atas tujuan yang hendak dicapai dengan memfokuskan perhatian pada aspek output, ini berarti efektivitas mampu dilihat dari seberapa jauh output yang diperoleh pada kebijakan dan prosedur dari organisasi guna tercapainya tujuan yang sudah ditetapkan.

#### **3. Kepuasan Terhadap Program**

Kepuasan adalah kriteria efektivitas yang mengarah kepada berhasilnya program untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Yakni kepuasan yang dirasa oleh pengguna atas kualitas produk atau jasa yang disajikan. Ditinjau dari tingkat kepuasan yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna (Kaawoan et al., 2022).

#### **4. Tingkat input dan output**

Pada efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara masukan (*input*) dengan keluaran (*output*). Jika *output* lebih besar dari input maka dapat dikatakan efisien dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* maka dapat dikatakan tidak efisien (Fakhriyah et al., 2022).

#### **5. Pencapaian Tujuan Menyeluruh**

Dalam hal ini adalah bentuk penilaian umum dari banyaknya kriteria tunggal sehingga menghasilkan penilaian

umum organisasi. Sejauh mana organisasi melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini merupakan penilaian umum dengan sebanyak mungkin kriteria tunggal dan menghasilkan penilaian umum efektivitas organisasi.

### **C. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR) bidang Sumber Daya Alam-IL Kota Palembang. Penentuan narasumber penelitian ini dilakukan dengan teknik Purposive Sampling, dimana penelitian dilakukan dengan kriteria yang telah ditentukan dan ditentukan berdasarkan tujuan penelitian (Sugiyono, 2018).

Sumber data yang digunakan adalah Jabatan Fungsional Teknik Irigasi Kantor PUPR Kota Palembang yang dinilai memiliki kapasitas pengendalian dan pencegahan banjir. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer (Winarni, 2018) dengan proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan mengacu pada tahapan yang dijelaskan oleh Miles dan Huberman yang terdiri dari pengurangan data, tampilan data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Keberhasilan Program**

Efektivitas program dapat dilakukan dengan kemampuan operasional dalam melaksanakan program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Keberhasilan program dapat ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan (Pathony et al., 2020). Rencana strategis yang dibuat oleh daerah harus menempatkan kinerja yang berdampak dan bermanfaat yang mereka hasilkan sesuai dengan keberadaan daerah. Sebagai tolak ukur pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, rencana strategis yang dibuat harus transparan demi akuntabilitas, dan harus melibatkan pemangku kepentingan di daerah. Program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang.

Secara umum, Dinas PUPR Kota Palembang dalam konteks penanganan banjir, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan penanggulangan banjir hanya bersifat jangka pendek dan tidak menggambarkan metode perencanaan yang sistematis dan terintegrasi. Agar peneliti memberikan kesimpulan tentang aspek perencanaan penanggulangan banjir, Dinas PUPR Kota

Palembang melakukan perencanaan yang memuat strategi penanggulangan banjir, kebijakan yang memadai, dan program penanggulangan banjir jangka panjang.

Program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang meliputi: Pembangunan Tanggul dan Bangunan Penampungan Air Lainnya, Pembangunan Bangunan Penguat Tebing, Pembangunan Gerbang Pengendali Air/Bendung, Pembangunan Stasiun Pompa Banjir, Rehabilitasi Polder/Kolam Retensi, Normalisasi/Restorasi Sungai, Pengoperasian dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir, Pengoperasian dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi, Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan banyak lagi.

Proses pelaksanaan program dari Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang dimulai dari perencanaan strategis dilanjutkan dengan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi geografis Kota Palembang, pola curah hujan, dan infrastruktur drainase yang ada. Hasil analisis Dinas PUPR Kota Palembang menetapkan prioritas untuk daerah yang paling rentan banjir. Hasil perencanaan strategis menyusun program kerja yang terperinci beserta alokasi anggaran yang memadai. Program ini

mencakup berbagai kegiatan seperti pembangunan infrastruktur baru, rehabilitasi sistem drainase yang ada, pembangunan tanggul, dan pemeliharaan infrastruktur secara rutin.

Proses pelaksanaan program dari Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang diawali dengan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur yang direncanakan, seperti saluran air, saluran pembuangan, tanggul, dan sistem retensi air, pemeliharaan berkala untuk memastikan sistem drainase dan retensi air tetap berfungsi secara optimal, pembersihan saluran, perbaikan kerusakan kecil, dan evaluasi kinerja rutin. Selama proses pelaksanaan, Dinas PUPR Kota Palembang melakukan pengawasan dan pemantauan kondisi infrastruktur dan kinerja sistem drainase. Dinas PUPR Kota Palembang terlibat aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya peran mereka dalam menjaga sistem drainase dan mengurangi risiko banjir. Secara berkala, Kantor PUPR mengevaluasi efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan.

### **Keberhasilan Program**

Keberhasilan tujuan adalah ukuran efektivitas yang ditinjau dari perspektif pencapaian tujuan, di mana keberhasilan suatu organisasi harus mempertimbangkan

tidak hanya tujuan organisasi tetapi juga mekanisme untuk mempertahankan tujuan. Dengan kata lain, penilaian efektivitas harus terkait dengan masalah tujuan dan sasaran. Artinya, efektivitas dapat diukur dari sejauh mana tingkat target dalam program atau kebijakan dari pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Mamonto et al., 2022).

Keberhasilan suatu program tidak hanya bergantung pada individu atau satu entitas, tetapi melibatkan kolaborasi dan koordinasi antara berbagai anggota organisasi. Program tersebut dipandang sebagai sistem yang terdiri dari serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif sejumlah orang. Bagaimana Kantor PUPR Kota Palembang mensosialisasikan program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pencegahan dan pengendalian banjir di Kota Palembang kepada masyarakat luas. Dinas PUPR Kota Palembang mengerahkan tim sosialisasinya yang nantinya akan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait (biasanya perangkat desa) untuk mengedukasi masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar DAS (DAS), tentang pentingnya menjaga lingkungan untuk klasifikasi alam dan masih banyak lagi.

Program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang dalam upaya

pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang diketahui masyarakat luas. Hasil respon masyarakat terhadap program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir. Respon ini dilakukan dengan menggunakan google form untuk melihat hasil pencapaian tujuan. Jumlah responden sebanyak 50 orang yang tersebar di wilayah Kota Palembang, dimana 8 orang (16%) berdomisili di Kecamatan Alang-Alang Lebar, 6 (12%) orang berdomisili di Kecamatan Gandus, 5 (10%) orang berdomisili di Kecamatan Kalidoni, 4 orang (8%) berdomisili di Kecamatan Kertapati, 7 orang (14%) berdomisili di Kecamatan Plaju dan 20 orang (40%) berdomisili di Kecamatan Soekarami.

Sebanyak 50 orang mengetahui program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang. Artinya, program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor PUPR disosialisasikan dengan baik dan merata. Dari hasil wawancara dengan masyarakat dan hasil kuesioner tentang program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang, masyarakat mengetahui tentang program tersebut. Masyarakat terlibat (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam pelaksanaan dan pelaksanaan program dan

kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang.

Program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pencegahan dan pengendalian banjir di Kota Palembang diketahui oleh masyarakat luas dan mendapat dukungan dari masyarakat. Kantor PUPR Kota Palembang sendiri sering mengajak masyarakat Kota Palembang untuk bersinergi menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti bekerja sama membersihkan saluran air yang tersumbat dan kotor dan lain sebagainya. Dinas PUPR Kota Palembang mengerahkan tim sosialisasi yang berkolaborasi dengan stakeholder terkait untuk mengedukasi masyarakat, khususnya yang tinggal di sekitar DAS (DAS).

### **Kepuasan dengan Program**

Kepuasan adalah kriteria efektivitas yang mengarah pada keberhasilan program untuk memenuhi kebutuhan penggunanya. Yakni kepuasan yang dirasakan oleh pengguna terhadap kualitas produk atau layanan yang dihadirkan. Dilihat dari tingkat kepuasan yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna (Kaawoan et al., 2022). Tingkat kepuasan masyarakat terhadap program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya

pencegahan dan pengendalian banjir di Kota Palembang.

Pemerintah (Dinas PUPR Kota Palembang) berpendapat bahwa, berdasarkan tindak lanjut pengaduan/laporan masyarakat, banyak masyarakat yang puas dengan program dan kegiatan Dinas PUPR dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang. Banyak orang yang berterima kasih kepada petugas di lapangan yang telah melengkapi laporan genangan/banjir. Namun, pernyataan ini berbanding terbalik dengan pernyataan KAWALI Sumatera Selatan dan masyarakat Kota Palembang, di mana mayoritas dari mereka menyatakan ketidakpuasannya terhadap program dan kegiatan serta kinerja Kantor PUPR dalam menangani permasalahan banjir di Kota Palembang.

KAWALI dan masyarakat menilai Dinas PUPR tidak cepat dan responsif dalam menangani permasalahan ini, karena faktanya masih ada beberapa wilayah di Kota Palembang yang menjadi pelanggan banjir dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, hal ini didukung oleh 50 responden kuesioner kepuasan masyarakat terhadap kinerja Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pencegahan dan penanganan banjir di Kota Palembang.

Hasil dari 50 responden tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja

Kantor PUPR Kota Palembang diperoleh bahwa 80% atau 40 orang menyatakan tidak puas dan 18% atau 10 orang menyatakan mungkin puas dengan kinerja Kantor PUPR dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang. Dari hasil tersebut, perlu penataan dan pemerataan program dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Dinas PUPR terkait pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang.

Dalam proses pengendalian dan pencegahan banjir Kantor PUPR Kota Palembang, tentunya ada kendala yang menghambat proses pelaksanaan program yang berdampak pada masyarakat terdampak banjir. Kendala Kantor PUPR Kota Palembang dalam menangani permasalahan banjir di Kota Palembang. Kendala yang dihadapi oleh Dinas PUPR Kota Palembang adalah sampah, masih banyak masyarakat terutama yang tinggal di daerah aliran sungai (DAS), yang suka membuang sampah sembarangan, yang mengakibatkan terhambatnya aliran air, yang kemudian menyebabkan banjir. Keterbatasan anggaran juga menjadi salah satu kendala bagi Kantor PUPR Kota Palembang dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Palembang. Hal ini didukung oleh pernyataan BPBD Sumatera Selatan yang menyatakan bahwa tingkat

kesadaran dan kesiapsiagaan masyarakat terhadap banjir masih perlu ditingkatkan.

Solusi yang ditawarkan KAWALI Sumatera Selatan kepada Kantor PUPR Kota Palembang adalah membutuhkan pemimpin yang sadar akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Revitalisasi sungai, lebak, dan rawa yang rusak dapat menjadi salah satu solusi untuk meminimalisir potensi banjir di Kota Palembang. Selain itu, pemerintah juga dapat menggunakan pendekatan NbS (Nature-Based Solutions), yang merupakan solusi yang melibatkan cara kerja alam untuk mengatasi tantangan sosial dan lingkungan, dalam konteks banjir ini. Misalnya: bioswale dan atap hijau. Pembangunan bangunan ilegal yang dibangun di atas saluran air yang dapat menghambat perjalanan saluran air. Hingga saat ini, pemerintah telah menertibkan sebanyak 300 bangunan ilegal untuk memulihkan ruang air. Pemerintah harus lebih rutin mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan kepada masyarakat.

### **Tingkat Input dan Output**

Efektivitas tingkat input dan output dapat dilihat dari perbandingan antara input dan output. Jika output lebih besar dari input, dapat dikatakan efisien dan sebaliknya, jika input lebih besar dari

output, dapat dikatakan tidak efisien (Fakhriyah et al., 2022). Dari masukan Kantor PUPR berupa laporan online melalui website resmi dan media sosial Kantor PUPR Kota Palembang di bidang SDA-IL (Sumber Daya Air, Irigasi dan Limbah).

Jika terjadi banjir di wilayah Kota Palembang, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan/laporan secara online melalui website SI MANIS dan akun Instagram resmi Kantor PUPR Kota Palembang di bidang SDA-IL. Dinas PUPR Kota Palembang memberlakukan tim sosialisasi, yang berkolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait untuk membahas kembali solusi penanganan banjir di daerah terdampak bersama RT/RW dan masyarakat setempat.

Dinas PUPR Kota Palembang akan mengirimkan tim sosialisasi, yang bekerja sama dengan para pemangku kepentingan. Bentuk partisipasi masyarakat meliputi: 1) Membuang sampah di tempatnya, 2) Ikut gotong royong membersihkan saluran air yang tersumbat dan kotor, 3) Ikut membantu dan mengawasi program dan kegiatan petugas di lapangan, 4) Menyumbangkan tanah kepada pemerintah untuk pembangunan kolam retensi, pembangunan sistem drainase dan sebagainya, 5) Masyarakat juga dapat memberikan masukan dan saran kepada pemerintah untuk menjadi lebih baik.

Kantor PUPR Kota Palembang memiliki dua cara untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang, yaitu secara digital dan manual. Secara digital, Kantor PUPR menggunakan IT untuk memantau pelaksanaan program dan kegiatan di lapangan. Secara manual, Dinas PUPR mengajak aparatur daerah/stakeholder terkait untuk ikut memantau petugas di lapangan. Kemudian, Kantor PUPR Kota Palembang menyatakan bahwa sejauh ini belum ada program dan kegiatan Kantor PUPR yang belum terealisasi, yang artinya program dan kegiatan yang telah dirancang telah terealisasi. Sementara itu, menindaklanjuti laporan masyarakat jika terjadi banjir di Kota Palembang, Dinas PUPR akan mengerahkan petugas Konstruksi OP MONEV untuk melakukan survei lapangan atau survei lokasi terlebih dahulu, baru setelah itu pengaduan/laporan masyarakat akan terealisasi.

### **Mencapai Tujuan Keseluruhan**

Dalam hal ini, ini adalah bentuk penilaian umum dari banyak kriteria tunggal sehingga menghasilkan penilaian umum terhadap organisasi. Se jauh mana organisasi melakukan tugasnya untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, ini adalah penilaian umum dengan kriteria tunggal sebanyak mungkin dan menghasilkan

penilaian umum terhadap efektivitas organisasi (Fakhriyah et al., 2022). Program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang berdampak positif terhadap pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang.

Pemerintah melalui Kantor PUPR Kota Palembang menyatakan bahwa program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang berdampak positif terhadap pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang, hal ini terlihat dari titik-titik banjir di Kota Palembang yang mulai menurun dalam beberapa waktu terakhir. Program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang untuk mengurangi banjir di Kota Palembang.

Hasil dari 50 responden mengenai apakah program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang telah berhasil mengurangi banjir di Kota Palembang dalam beberapa tahun terakhir, hasil diperoleh bahwa 64% atau 32 orang menyatakan belum berhasil mengurangi banjir di Kota Palembang, 22% atau 11 orang menyatakan bahwa mereka mungkin berhasil mengurangi banjir, sedangkan sisanya 14% atau 7

orang menyatakan bahwa mereka telah berhasil mengurangi banjir. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar masyarakat Kota Palembang menilai bahwa program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang belum berhasil meredam banjir di Kota Palembang secara merata.

Dinas PUPR meyakini bahwa program mereka telah berhasil mengurangi banjir di Kota Palembang, terlihat dari penurunan jumlah titik banjir. Namun, KAWALI dan masyarakat bersebalik pendapat, karena Kota Palembang masih sering mengalami banjir dalam beberapa tahun terakhir. Solusinya adalah dengan melakukan evaluasi bersama antara Dinas PUPR, KAWALI, dan masyarakat untuk membahas efektivitas program pengendalian banjir. Ini termasuk memverifikasi data titik banjir dan mendengarkan pengalaman warga secara langsung. Selain itu, perlu adanya peningkatan transparansi dan kolaborasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program, dengan melibatkan semua pihak untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil benar-benar efektif dan merespon kebutuhan masyarakat.

Program dan kegiatan Kantor PUPR Kota Palembang dalam upaya

pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang efektif dalam mengendalikan dan mencegah banjir di Kota Palembang. Respon KAWALI Sumatera Selatan dan masyarakat didukung oleh respon dari 50 orang di Kota Palembang melalui kuesioner yang disebarakan peneliti ke beberapa daerah di Kota Palembang.

Hasil dari 50 responden mengenai efektivitas program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang dalam upaya pengendalian dan pencegahan banjir di Kota Palembang, ditemukan bahwa 60% atau 33 orang menyatakan bahwa program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang tidak efektif dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Palembang, sementara 30% atau 17 orang menyatakan bahwa program dan kegiatan Dinas PUPR Kota Palembang mungkin efektif dalam mengatasi permasalahan banjir di Kota Palembang.

Dinas PUPR merasa program pengendalian banjir mereka efektif di Kota Palembang, sementara KAWALI dan masyarakat berpikir sebaliknya karena banjir masih sering terjadi, terutama saat hujan lebat. Solusinya adalah dengan melakukan evaluasi bersama untuk menilai efektivitas program, meningkatkan transparansi, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengendalian banjir.

## **E. KESIMPULAN**

Dinas PUPR Kota Palembang telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan pengendalian dan pencegahan banjir, termasuk pembangunan infrastruktur seperti tanggul, pintu air, stasiun pompa banjir, dan pemeliharaan sistem drainase. Mereka percaya bahwa upaya ini telah menunjukkan hasil yang positif, sebagaimana dibuktikan dengan penurunan titik banjir dalam beberapa tahun terakhir. Program ini juga melibatkan perencanaan strategis awal, analisis kondisi geografis, dan prioritas daerah rentan untuk menentukan alokasi anggaran dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan. Sebagai solusi, Kantor PUPR disarankan untuk melakukan evaluasi bersama dengan KAWALI dan masyarakat untuk menilai kembali efektivitas program yang ada. Peningkatan transparansi, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, dan evaluasi berkala sangat penting untuk meningkatkan strategi pengendalian banjir. Kantor PUPR juga perlu meningkatkan sosialisasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mengidentifikasi dan mengatasi kendala yang ada, serta mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anisah, A., & Soesilowati, E. (2018). Efektivitas Program Kartu Jakarta Pintar Tingkat Sekolah Menengah Atas Negeri di Kecamatan Pesanggrahan. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(1), 44–50. <https://doi.org/10.15294/efficient.v1i1.27218>
- Astuti, A. F., & Sudarsono, H. (2018). Analisis Penanggulangan Banjir Sungai Kanci. *Jurnal Konstruksi Dan Infrastruktur*, 7(3), 163–170.
- Awaliah, A. (2022). Efektivitas Penghimpun dan Pendistribusian Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Bantaeng. *At Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam*, 2, 1–19.
- Darman, A. A. El. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(2), 113–131. <https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485>
- Fakhriyah, R., Kencana, N., & Qur, M. (2022). Efektivitas Penerapan Inovasi Pelayanan Publik Dalam Pengembangan E-Government (Studi Kasus Aplikasi SP4N Laporan! Di Provinsi Sumatera Selatan). *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 7(3), 48–54.
- Indonesia, R. (2007). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. *Lembaran Negara RI Tahun 2007*.
- Jati, R. P. (2021). *Banjir di Palembang Telan Dua Korban Jiwa*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/25/banjir-di-palembang-telan-dua-korban-jiwa>
- Julianto, B., & Carnarez, T. Y. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Organisasi Kinerja, dan Efektivitas Organisasi (Suatu Kajian Studi Literature Review Ilmu Manajemen Terapan). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(5), 676–691. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i5.592>
- Kaawoan, E., Ruru, J., & Kolondam, H. (2022). Efektivitas Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kelurahan Malalayang Satu Barat Kecamatan Malalayang Kota Manado. *JAP (Jurnal Administrasi Publik)*, 8(113), 5.
- Lestanata, Y., & Pribadi, U. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Program Pembangunan Berbasis Rukun Tetangga Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2014-2015. *Journal of Governance and Public Policy*, 3(3), 368–389. <https://doi.org/10.18196/jgpp.2016.0063>
- Maleke, T. S., Pangkey, M., & Tampongangoy, D. (2022). Efektivitas Program Kampung Keluarga Berencana (KB) di Desa Temboan Kecamatan Maesaan Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, VIII(119), 27–36.

- Mamonto, S. I. P., Rachman, I., & Kumayas, N. (2022). Efektivitas Kinalang Sebagai Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis Elektronik Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Governance*, 2(1), 1–14.
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69–87.
- Pahlevi, R. (2024). *120 TPS di Palembang Rawan Banjir, KPU Lakukan Pemetaan*. Detik.Com. <https://www.detik.com/sumbagsel/berita/d-7166915/120-tps-di-palembang-rawan-banjir-kpu-lakukan-pemetaan>
- Palembang, G. K. (2022). *Peta Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Palembang*. Bappedalitbang.Palembang.Go.Id. <https://bappedalitbang.palembang.go.id/peta-kawasan-rawan-bencana-banjir-kota-palembang.html>
- Pathony, T., Yuhana, K., & Kusnadi, I. H. (2020). Efektivitas Program Pemberdayaan Nelayan Pada Dinas Perikanan Kabupaten Subang (Studi Kasus Di Kecamatan Blanakan). *The World of Business Administration Journal*, 2(1), 39–59. <https://doi.org/10.37950/wbaj.v2i1.914>
- Pratiwi, F. S. (2024). *Data Jumlah Kejadian Banjir di Indonesia (2013-2023)*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/varia/detail/data-jumlah-kejadian-banjir-di-indonesia-20132023>
- Putra, A. Y., & Khairina. (2021). *Banjir Besar di Palembang, Dosen UIN dan Driver Ojek Online Meninggal*. Regional.Kompas.Com. [https://regional.kompas.com/read/2021/12/26/174053578/banjir-besar-di-palembang-dosen-uin-dan-driver-ojek-online-meninggal?lgn\\_method=google&google\\_btn=onetap](https://regional.kompas.com/read/2021/12/26/174053578/banjir-besar-di-palembang-dosen-uin-dan-driver-ojek-online-meninggal?lgn_method=google&google_btn=onetap)
- Rentschler, Jun, Salhab, M., & Jafino, B. A. (2022). *Negara di Wilayah Asia Memiliki Ancaman Bencana Banjir Paling Tinggi Sedunia*. Dmc.Dompetdhuafa.Org. <https://dmc.dompetdhuafa.org/negara-di-wilayah-asia-memiliki-ancaman-bencana-banjir-paling-tinggi-sedunia/>
- Sasongko, J. (2022). *Pengamatan Walhi, Ada 10 Titik Rawan Banjir di Kota Palembang*. Sonora.Id. <https://www.sonora.id/read/423610598/pengamatan-walhi-ada-10-titik-rawan-banjir-di-kota-palembang>
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.
- Sumsel, B. (2021). *Profil Kejadian Bencana Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2020*. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Umam, K. (2021). Strategi pengembangan sumber daya manusia karyawan commanditaire vennootschap dalam meningkatkan efektivitas kinerjanya. *Jurnal MANOVA*, IV(1), 68–83. <https://doi.org/10.15642/manova.v4i1.387>
- Wahyudi, M., Azikin, R., & Rahim, S. (2019). Manajemen Penanggulangan Banjir di Kelurahan Paccerakkang Kota Makassar. *Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik*, 5(1), 31–45. <https://doi.org/10.26618/kjap.v5i1.2033>
- Winarni. (2018). *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bumi Aksara.